

## STRATEGI PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

**Markus Patiung**

[markuspatiung@uwks.ac.id](mailto:markuspatiung@uwks.ac.id)

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Strategi Penganggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan bertujuan untuk menerbitkan panduan baru tentang pedoman penanggulangan kemiskinan sebagai pegangan resmi TKPKD maupun pedoman dan modul-modul penyusunan SPKD terbaru yang lebih menekankan pada analisis dan pendekatan yang terencana, terpadu, menyeluruh dan sistematis serta berkesinambungan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan merasa perlu untuk menyusun review dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bangkalan untuk Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan yaitu dilakukan pengumpulan data di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari dimensi-dimensi kemiskinan, baik itu dimensi ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, maupun kecukupan pangan pada dasarnya adalah penyebab langsung dari kondisi kemiskinan seseorang atau seke-lompok orang. Ciri/kondisi yang menjadi penyebab kemiskinan ini merupakan akibat dari adanya keputusan, kebijakan atau tindakan yang cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. Keputusan, kebijakan maupun tindakan yang tidak adil dan cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan ini terjadi karena lembaga pengambil keputusan maupun kebijakan yang belum berdaya dikarenakan lembaga ini berisi orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskan nya. Di sisi lain ketidakberdayaan lembaga pengambil keputusan/kebijakan akan semakin tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidak-berdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk men-gatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudar nya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

**Kata kunci : Kemiskinan, Kebijakan, Infrastuktur Dasar..**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Saat ini kemiskinan sudah tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya (inter locking), dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan. Persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensi-nya disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadi-nya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

Kesadaran akan hal tersebut telah mendorong sedikitnya 189 Presiden dan Kepala Pemerintahan pada tahun 2000 di Rio De Janeiro–Brazil untuk menandatangani komitmen bersama dalam penanggulangan kemiskinan melalui 8 (delapan) agenda kesepakatan yang berskala global yakni, *Millenium Development Goals* (MDG's)<sup>1)</sup>.

Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut bergabung dalam penandatanganan kesepakatan MDG's, saat ini telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai salah satu komitmen keikutsertaan dalam komitmen global tersebut. Bahkan pada bulan Maret 2010 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antar lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, moni-toring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden di atas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1)</sup> Kesepakatan MDG's berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan agenda SDG's (*Sustainable Development Goals*)

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian-capaian yang signifikan dimana salah satunya adalah capaian perkembangan prosentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional menunjukkan trend menurun, pada tahun 2003 tercatat sebesar 32,25 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 22,57 persen. Meski demikian, berdasarkan capaian tahun 2015 Kabupaten Bangkalan belum mencapai target capaian MDG's yang menetapkan angka maksimal 7,50 persen.

Secara kelembagaan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010, Kabupaten Bangkalan telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bangkalan dan telah menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Bangkalan dalam penanggulangan kemiskinan.

Dengan berbagai perkembangan baru yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, baik secara regional maupun nasional, dan dengan telah diterbitkan panduan baru tentang pedoman penanggulangan kemiskinan sebagai pegangan resmi TKPKD maupun pedoman dan modul-modul penyusunan SPKD terbaru yang lebih menekankan pada analisis dan pendekatan yang terencana, terpadu, menyeluruh dan sistematis serta ber-kesinambungan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan merasa perlu untuk menyusun review dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bangkalan untuk Tahun 2016.

## Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Bangkalan.

### Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan konsumsi adalah melihat ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi (konsumsi) kebutuhan dasar baik berupa kebutuhan makanan maupun non makanan. Batas pemenuhan kebutuhan makanan dan bukan makanan disebut dengan garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Bangkalan tahun 2015 adalah sebesar 216,2 ribu jiwa atau sekitar 22,57 persen<sup>2)</sup> dari jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan pada tahun yang sama. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2014 yang

Gambar 1,  
Posisi Relatif Prosentase Kemiskinan  
Kab. Bangkalan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional,  
Tahun 2015



Sumber: Publikasi BPS – data diolah

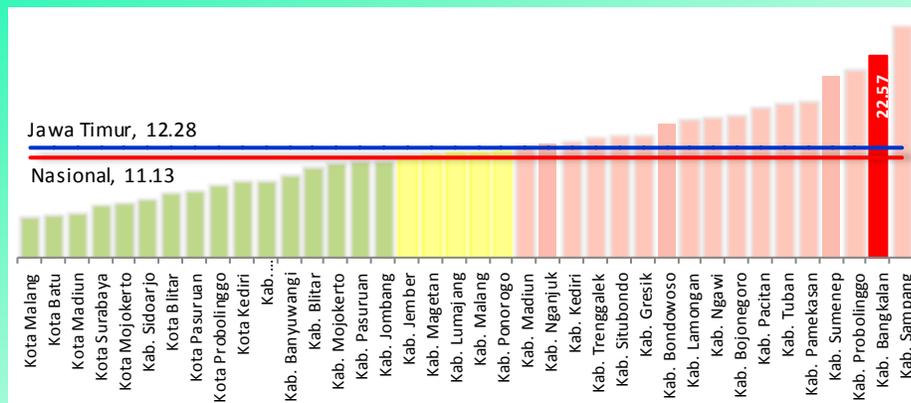
<sup>2)</sup> Angka kemiskinan ini masih berada di atas target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan sebesar 6-8%.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

berjumlah 112,2 ribu (22,38%), maka pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan telah bertambah sebanyak 4 ribu jiwa atau persentasenya bertambah sebesar 0,19 poin.

Prosentase penduduk miskin Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 lebih tinggi (lebih buruk) bila diban-dingkan capaian angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional, di-mana persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sebesar 12,28 persen sedang-kan capaian secara Nasional adalah 11,13 persen.

Gambar 2,  
Posisi Relatif Persentase Kemiskinan Kabupaten Bangkalan  
terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015



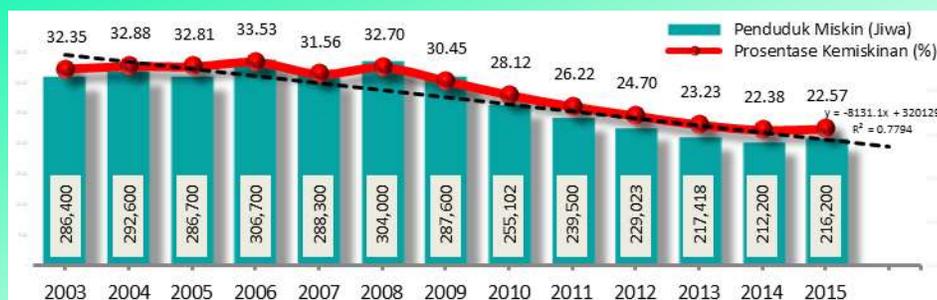
Sumber: Publikasi BPS – data diolah

Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan (pada tahun 2015) menempati urutan ke 37 (tiga puluh tujuh) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Perkembangan jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan selama periode tahun 2003-2015, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun (gambar 3).

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend menurun, mengindikasikan bahwa kebijakan maupun program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif mengurangi angka kemiskinan. Meskipun pada tahun 2015 per-sentase penduduk miskin sempat mengalami kenaikan dari tahun

Gambar 3,  
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangkalan, Tahun 2003-2015

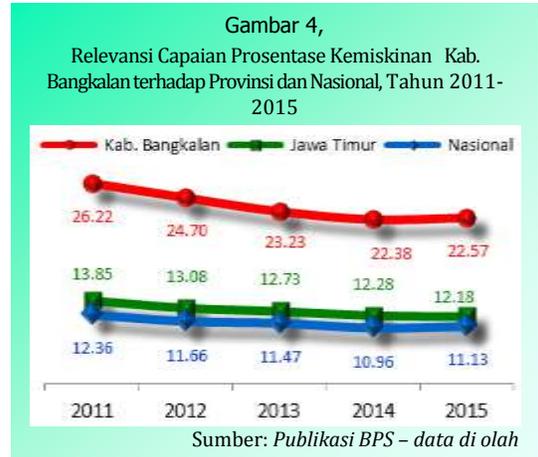
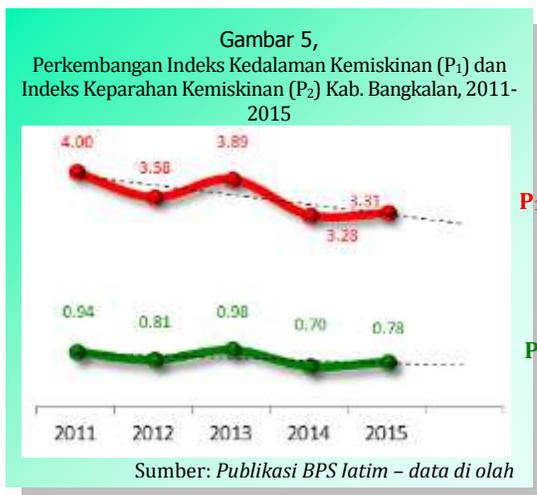


Sumber: Publikasi BPS – data diolah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

sebelumnya, akan tetapi secara umum, upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan selama tahun 2011-2015 relevan dengan tujuan dan upaya-upaya di Provinsi Jatim maupun upaya secara Nasional.

Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 adalah sebesar 3,31 persen meningkat 0,03 poin dibandingkan kondisi tahun 2014. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) tahun 2015 sebesar 0,78 meningkat 0,08 poin dibandingkan capaian pada



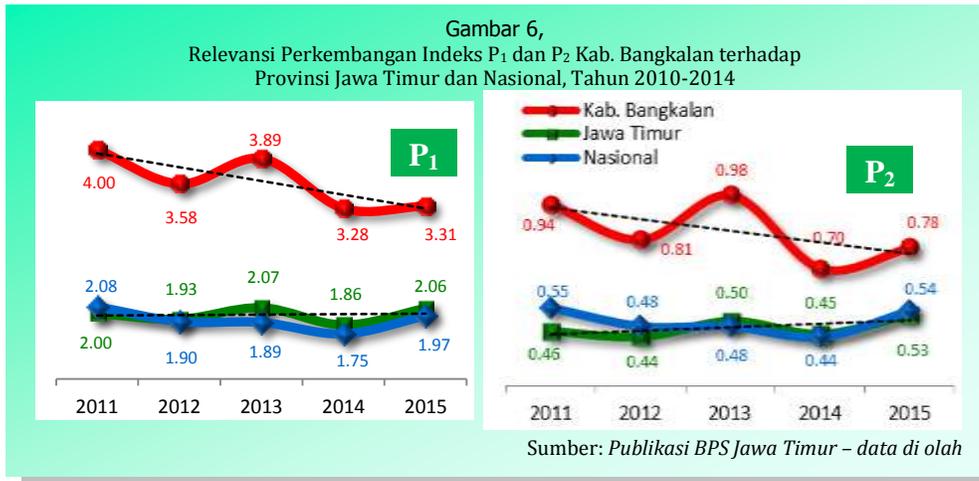
tahun 2014. Dengan perkembangan  $P_1$  yang semakin besar, berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Sedangkan dengan nilai  $P_2$  yang semakin tinggi berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin

tinggi.

Pada periode 2011-2015, indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif dengan trend perkembangan yang cenderung menurun.

Meskipun perkembangan indeks  $P_1$  dan  $P_2$  Kabupaten Bangkalan selama periode tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif, perkembangan indeks  $P_1$  dan  $P_2$  Kabupaten Bangkalan selama periode ini tidak relevan dengan perkembangan indeks  $P_1$   $P_2$  yang terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional (gambar 6).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)



Secara ringkas, rangkuman dari hasil analisis masalah utama kemiskinan di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1,**  
Rangkuman Hasil Analisis Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Bangkalan

		Perspektif Analisis			
		Analisis Posisi Relatif	Analisis Perkembangan Antar-Waktu	Analisis Efektifitas	Analisis Relevansi
<b>Indikator</b>	Persentase (%) penduduk miskin (P <sub>0</sub> )	Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional	Selama 2011-2015 (5 tahun terakhir) menunjukkan trend perkembangan menurun, meskipun pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan angka kemiskinan.	Trend perkembangan yang menurun pada 5 th terakhir menunjukkan kebijakan dan program Nangkis dlm menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin	Trend perkembangan dalam 5 th terakhir relevan dgn Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
	Jumlah penduduk miskin	Berada pada posisi 37 di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur			
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )	Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional	Selama 2011-2015 (5 tahun terakhir) menunjukkan trend perkembangan yg menurun	Trend perkembangan yg menurun pada 5 th terakhir berarti kebijakan dan program Nangkis efektif dalam memper-kecil kesenjangan dan ketimpangan kemiskinan	Trend perkembangan dalam 5 th terakhir tidak relevan dgn Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

		Perspektif Analisis			
		Analisis Posisi Relatif	Analisis Perkembangan Antar-Waktu	Analisis Efektifitas	Analisis Relevansi
	Indeks Keperahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )	Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional			

**Kemiskinan Non Konsumsi (Multidimensi).**

Secara umum kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, masalah ketenagakerjaan dan kewira usahaan, serta rentannya kecukupan pangan.



kelima hal tersebut selanjutnya menjadi ruang lingkup pada analisis kemiskinan non-konsumsi.

Analisis kondisi kemiskinan non-konsumsi di Kabupaten Bangkalan digambarkan dengan cara melakukan: (i) analisis posisi relatif, (ii) analisis perkembangan antar waktu dan (iii) analisis relevansi pada indikator-indikator utama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan kecukupan pangan, sehingga ditemukan apa-apa saja permasalahan yang terjadi di setiap bidang yang harus diprioritaskan (menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan).

**Analisis Posisi Relatif.**

Analisis posisi relatif dilakukan dengan membandingkan capaian terakhir masing indikator bidang di Kabupaten Bangkalan dengan capaian di tingkat Provinsi dan Nasional. Tabel berikut menunjukkan posisi relatif indikator-indikator utama pada masing-masing bidang di Kabupaten Bangkalan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

**Tabel 2,**  
Posisi Relatif Indikator Utama Masing-Masing Bidang  
(Kemiskinan Non Konsumsi/Multidimensi)

Bidang / Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2015		
		Kab. Bangkalan	Jawa Timur	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Bidang Pendidikan:</b>				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	113,80	106,68	110,50
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	90,14	91,13	91,17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	58,30	80,02	78,02
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	97,31	97,38	96,70
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	70,07	81,16	72,82
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	42,91	60,31	59,71
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 th	%	0,20	0,464	0,659
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th	%	0,13	6,807	11,802
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th	%	0,20	39,936	38,839
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15+	%	85,08	99,64	95,22
<b>Bidang Kesehatan:</b>				
Angka Kematian Bayi	/1.000 kh	52,56	25,82	32,00
Angka Kematian Ibu (melahirkan)	/100rb kh	82,73	98,95	359,00
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	%	1,09	19,77	20,17
Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis	%	99,74	96,28	87,23
<b>Bidang Ketenagakerjaan:</b>				
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,00	4,48	5,94
Pekerja bekerja kurang dari 35 jam /minggu	%	n/a	32,24	29,88
Pekerja sektor informal (pertanian-non pertanian)	%	n/a	63,19	57,76
<b>Bidang Infrastruktur Dasar:</b>				
Proporsi Rumah Tangga dg akses Air Minum Layak	%	63,69	76,64	70,97
Proporsi Rumah Tangga dg akses Sanitasi Layak	%	36,61	63,48	62,14
Proporsi Rumah Tangga dg akses Listrik	%	97,42	99,87	97,27
<b>Bidang Ketahanan Pangan:</b>				
rRaRata-Rata Harga Beras	Rp	9.500	9.731	9.764
<b>Harga Bahan Pokok Utama non Beras:</b>				
▪ Gula pasir	Rp	12.000	12.505	13.782
▪ Minyak goreng	Rp	11.000	11.494	13.722
▪ Daging sapi lokal	Rp	110.000	104.889	103.043
▪ Daging ayam ras	Rp	30.000	28.806	34.534
▪ Telur ayam ras	Rp	23.000	17.151	17.769
▪ Cabai merah	Rp	21.000	35.380	30.462
▪ Bawang merah	Rp	20.000	34.255	35.972
▪ Bawang putih	Rp	20.000	31.382	33.855
▪ Jagung pipilan kering	Rp	8.000	5.571	6.920
▪ Kedelai lokal	Rp	8.500	7.984	8.821

Keterangan: n/a = not Available = tidak tersedia (data)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas (tabel 6), dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis posisi relatif nya:

1. Pada bidang pendidikan, dari 10 (sepuluh) indikator utama bidang pendidikan:

- a. yang menunjukkan capaian lebih rendah dari capaian Provinsi mau-pun Nasional adalah indikator APK dan APM SMP/MTs; APK dan APM SMA/MA/SMK;
  - b. Yang menunjukkan capaian lebih rendah dari capaian Provinsi tetapi masih lebih tinggi terhadap capaian Nasional (atau sebaliknya) adalah indikator APM SD/MI dan AMH penduduk usia 15+;
2. Indikator-indikator tersebut untuk selanjutnya akan menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan.
  3. Pada bidang kesehatan, dari 4 (empat) indikator utama bidang kesehatan, indikator yang masih bermasalah yaitu AKB per 1000 kelahiran hidup yang menunjukkan capaian lebih buruk dibanding capaian Provinsi Jawa Timur maupun terhadap capaian Nasional. Selanjutnya indikator ini dapat menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.
  4. Pada bidang ketenagakerjaan, dari 3 (tiga) indikator utama bidang ketenagakerjaan, hanya indikator TPT (Tingkat Pengangguran terbuka) yang memiliki data dan menunjukkan capaian lebih baik dibanding capaian Provinsi Jawa Timur akan tetapi lebih buruk dari capaian Nasional, sehingga indikator ini menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan.
  5. Pada bidang infrastruktur dasar, dari 3 (tiga) indikator utama bidang infrastruktur dasar, semuanya menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang prasarana/infrastruktur dasar. Hal tersebut karena proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak dan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak menunjukkan capaian lebih buruk dibanding capaian Provinsi maupun capaian Nasional, sedangkan indikator proporsi rumah tangga dengan akses listrik meskipun masih lebih baik terhadap capaian Nasional tapi masih lebih rendah terhadap capaian Provinsi.
  6. Pada bidang ketahanan pangan, dari indikator-indikator utama bidang ketahanan pangan, intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan lebih *focus* pada indikator rata-rata harga kebutuhan pangan non beras, yaitu pada rata-rata harga daging lokal; daging dan telur ayam ras; jagung pipilan kering dan kedelai lokal.

### **Analisis Perkembangan Antar Waktu.**

Analisis perkembangan antar waktu dilakukan dengan melihat perkembangan capaian suatu indikator dalam kurun waktu tertentu (sedikitnya 5 tahun). *Trend* perkembangan yang semakin membaik menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dapat berjalan efektif.

Tabel berikut menunjukkan data perkembangan antar waktu (5 tahun) pada indikator-indikator utama pada masing-masing bidang kemiskinan non konsumsi di Kabupaten Bangkalan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

**Tabel 3,**  
Capaian Indikator Utama Masing-Masing Bidang Tahun 2011-2015  
(Kemiskinan Non Konsumsi/Multidimensi)

Bidang / Indikator	Capaian Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Pendidikan:</b>					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107,76	107,81	114,00	109,75	113,80
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	71,93	88,68	70,99	76,79	90,14
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	30,34	30,34	43,08	59,71	58,30
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94,13	95,22	97,08	97,07	97,31
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	52,01	67,32	57,74	63,31	70,07
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	26,56	26,56	35,83	46,29	42,91
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12th	0,20	0,14	0,13	0,24	0,20
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15th	0,15	0,12	0,12	0,12	0,13
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18th	0,10	0,05	0,05	0,21	0,20
Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+	82,87	83,64	83,96	84,48	85,08
<b>Bidang Kesehatan:</b>					
Angka Kematian Bayi	54,22	54,56	53,69	53,12	52,56
Angka Kematian Ibu (melahirkan)	66,42	32,60	60,20	64,84	82,73
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	0,93	0,55	0,44	0,38	1,09
Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis	66,88	73,70	78,36	94,92	99,74
<b>Bidang Ketenagakerjaan:</b>					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,91	5,32	6,78	5,68	5,00
Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Pekerja sektor informal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Bidang Infrastruktur Dasar:</b>					
Proporsi Ruta dg akses Air Minum Layak	49,61	53,25	76,15	61,80	63,69
Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak	21,58	23,14	30,28	31,52	36,61
Proporsi Ruta dg akses Listrik	98,99	99,27	99,28	97,87	97,42
<b>Bidang Ketahanan Pangan:</b>					
Rata-Rata Harga Beras	6.000	7.000	8.500	8.500	9.500
<b>Harga Bahan Pokok Utama non Beras:</b>					
▪ Gula pasir	9.000	10.000	10.000	10.500	12.000
▪ Minyak goreng	10.000	10.000	10.500	11.000	11.000
▪ Daging sapi lokal	65.000	80.000	95.000	100.000	110.000
▪ Daging ayam ras	22.000	25.000	27.000	25.000	30.000
▪ Telur ayam ras	14.000	16.000	18.000	20.000	23.000
▪ Cabai merah	7.000	15.000	32.000	55.000	21.000
▪ Bawang merah	25.000	16.000	25.000	14.000	20.000
▪ Bawang putih	18.000	15.000	12.000	14.000	20.000
▪ Jagung pipilan kering	5.000	5.500	6.000	6.000	8.000
▪ Kedelai lokal	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500

Keterangan: ruta = rumah tangga

n/a = not available = tidak tersedia (data)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Pada bidang pendidikan, dari 10 indikator utama bidang pendidikan, semua indikator dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend perkembangan meningkat (membaik).
2. Pada bidang kesehatan, dari 4 indikator utama bidang kesehatan, 2 indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi yang menunjukkan trend perkembangan yang memburuk dalam 5 tahun terakhir,

- sehingga kedua indikator bidang kesehatan ini menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.
3. Pada bidang ketenagakerjaan, dari 3 indikator utama bidang ketenagakerjaan, hanya indikator TPT (Tingkat Pengangguran terbuka) yang memiliki data dan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin meningkat (memburuk), sehingga indikator ini menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan.
  4. Pada bidang infrastruktur dasar, indikator rumah tangga dengan akses listrik menunjukkan trend perkembangan capaian indikator yang menurun dalam 5 tahun terakhir, sehingga indikator ini menjadi *focus* intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang prasarana/infrastruktur dasar.
  5. Pada bidang ketahanan pangan, dari indikator-indikator utama bidang ketahanan pangan, indikator rata-rata harga beras; dan hampir semua harga kebutuhan makanan pokok non-beras di Kabupaten Bangkalan menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015.

#### **Prioritas (*focus*) intervensi bidang;**

Dari hasil analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian indikator terhadap perkembangan di tingkat provinsi dan Nasional, maka dapat dirangkum dalam tabel 8 sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / *focus* dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

**Tabel 4,**  
Rangkuman Analisis Kemiskinan Non-Konsumsi/Multidimensi Kabupaten Bangkalan

Bidang / Indikator	Perspektif Analisis				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Bidang Pendidikan:</b>					
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi, tapi lebih baik dari Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Putus Sekolah (APT <sub>s</sub> ) usia 7-12 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membah dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

Bidang / Indikator	Perspektif Analisis				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi, tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
<b>Bidang Kesehatan:</b>					
Angka Kematian Bayi	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Angka Kematian Ibu (melahirkan)	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 4-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> dalam 3-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas
Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Bukan Prioritas
<b>Bidang Ketenagakerjaan:</b>					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi, tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	fluktuatif dg trend <i>memburuk</i> pada 3 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas
Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu	<i>tidak cukup data</i>	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
Pekerja sektor informal	<i>tidak cukup data</i>	<i>tidak cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	<i>tdk cukup data</i>	
<b>Bidang Infrastruktur Dasar:</b>					
Proporsi Ruta dg akses Air Minum Layak	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membaik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
Proporsi Ruta dg akses Listrik	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	tidak relevan	Prioritas
<b>Bidang Ketahanan Pangan:</b>					
Rata-Rata Harga Beras	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

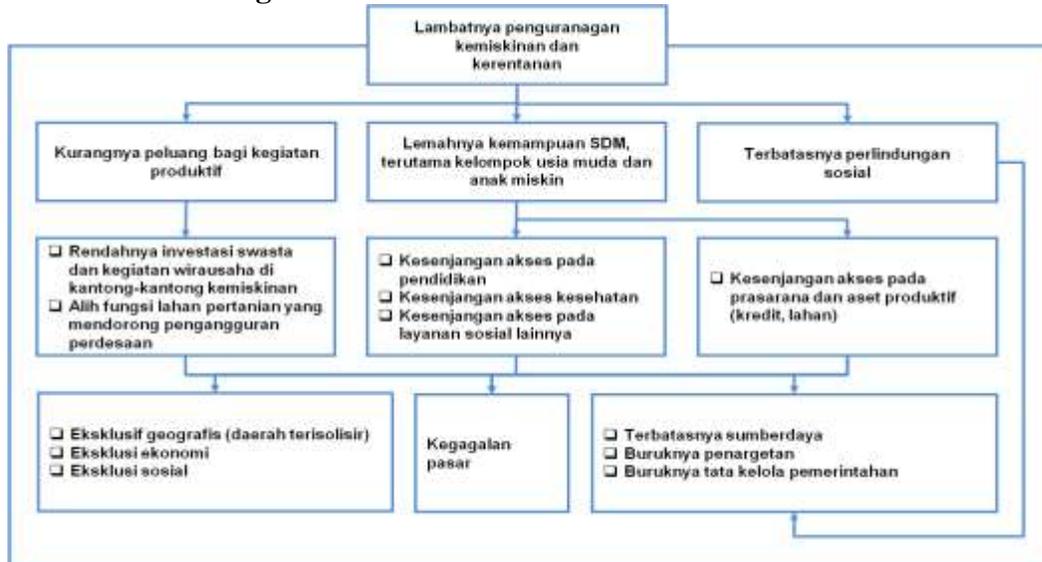
Bidang / Indikator	Perspektif Analisis				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektifitas	Relevansi	Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Harga Bahan Pokok Utama non Beras:</b>					
• Gula pasir	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Minyak goreng	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
• Daging sapi lokal	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Daging ayam ras	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Telur ayam ras	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Cabai merah	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Bawang merah	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	membalik dalam 3-5 th terakhir	efektif	tidak relevan	Bukan Prioritas
• Bawang putih	lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional	<i>memburuk</i> pada 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas
• Jagung pipilan kering	<i>lebih buruk</i> dari capaian Provinsi maupun Nasional	membalik dalam 3-5 th terakhir	efektif	relevan	Prioritas
• Kedelai lokal	<i>lebih buruk</i> dari Provinsi tapi <i>lebih baik</i> dari Nasional	membalik dalam 3-5 th terakhir	belum efektif	relevan	Prioritas

### Determinan Kemiskinan Daerah

Determinan kemiskinan daerah menjelaskan tentang cara menemukan akar masalah yang dihadapi pada setiap bidang. Determinan kemiskinan secara umum memiliki keterkaitan dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan. Selain itu determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap aset produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

**Gambar 8,**  
**Bagan Determinan Kemiskinan secara Umum**



### Analisis Akar Masalah.

Analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah atau disebut juga sebagai analisis determinan kemiskinan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut.

Akar masalah dari determinan kemiskinan dapat diperoleh melalui analisis dengan mempertimbangkan: (i) aspek ketersediaan/*supply side*; yaitu aspek dari sisi terpenuhinya tanggung jawab pemerintah baik berupa program maupun kebijakan dan pemenuhan sarana prasarana layanan kepada masyarakat, dan (ii) aspek pemanfaatan/*demand side*; yaitu aspek dari sisi masyarakat, yaitu bagaimana sarana, prasarana, program dan kegiatan yang sudah disediakan pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat, adakah hambatan-hambatan dari sisi masyarakat yang membuat pelayanan yang disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak optimal dimanfaatkan. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari persoalan ekonomi, sosial, dan budaya.

Analisis akar masalah pada setiap prioritas bidang intervensi adalah sebagai berikut:

### Kemiskinan Konsumsi:

Permasalahan utama adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Apabila dilihat dari aspek ketersediaan dan pemanfaatan terkait dengan kemiskinan konsumsi adalah sebagai berikut:

1) Aspek ketersediaan:

belum maksimalnya jangkauan program perlindungan sosial dalam upaya melindungi pemenuhan kebutuhan penduduk yang kurang mampu, utamanya terkait pelayanan pendidikan, kesehatan. Infra-struktur dasar dan kebutuhan bahan pokok.

□ belum maksimalnya sinergitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

2) Aspek pemanfaatan:

□ rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok khususnya pada rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terbawah di Kabupaten Bangkalan.

□ rendahnya daya saing kegiatan ekonomi, yang diakibatkan oleh rendahnya keterampilan wirausaha, keterampilan teknis dan terbatasnya akses pasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan.

□ perilaku sebagian masyarakat yang pada saat Pemerintah menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, maka kelompok ini berbondong-bondong mengaku miskin (bahkan lebih miskin dibanding lainnya).

### **Kemiskinan Non-Konsumsi:**

#### **Bidang Pendidikan:**

#### **Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni:**

Permasalahan angka partisipasi murni jenjang SD/MI demikian juga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK pada bidang pendidikan yaitu masih terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak atau belum sekolah. Bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a. Aspek ketersediaan:

- masih lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin.
- belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat.
- ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan terutama perpustakaan dan laboratorium.
- kebutuhan biaya operasional.
- cakupan BSM (Bantuan Siswa Miskin).
- distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah.
- belum tersedia dan terkelolanya data sasaran jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

b. Aspek pemanfaatan:

- rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan.
- masih terdapat penduduk usia sekolah 13-18 tahun dengan motivasi belajar/sekolah yang rendah disebabkan faktor lingkungan pergaulan maupun budaya.
- masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yang hanya tamat SMP dan begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja sehingga lebih baik putus sekolah di SMP dibanding SMA.

#### **Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+:**

Permasalahan Angka Melek Huruf (AMH) bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

a. Aspek Ketersediaan:

- belum sinkronnya data penduduk buta huruf antar instansi terkait.

- belum optimalnya kualitas, ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pemberantasan buta aksara.
- pelestarian warga belajar keaksaraan fungsional yang telah melek huruf belum optimal.
- b. Aspek Pemanfaatan:
  - kondisi lingkungan masyarakat belum sepenuhnya mendukung program pemberantasan buta aksara.
  - rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan.
  - letak lokasi kelompok belajar masyarakat jauh dari masyarakat sasaran (di ibukota kecamatan) sehingga masyarakat di desa-desa di wilayah kecamatan tersebut yang relatif jauh dari lokasi kelompok belajar menjadi enggan mengikuti program.
  - kesadaran masyarakat (yang masih buta huruf) untuk mengikuti penyelenggaraan pemberantasan buta aksara masih rendah.

#### **Bidang Kesehatan:**

##### **Angka Kematian Bayi:**

Permasalahan angka kematian bayi bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek ketersediaan:
  - jumlah sumber daya manusia pada Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 42,12 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 19,39 per 100.000 penduduk).
  - belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONED (*Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar*).
  - distribusi bidan desa.
  - tingginya beban kerja tenaga medis puskesmas di luar pelayanan kesehatan.
- b. Aspek pemanfaatan:
  - rendahnya kemampuan orang tua (miskin) sehingga perhatian terhadap kesehatan bayi dan balita kurang menjadi prioritas dalam pembiayaan ekonomi rumah tangga.
  - masih adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
  - masih adanya budaya lebih mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan.
  - masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk pola asupan makanan bayi, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.

##### **Angka Kematian Ibu Melahirkan:**

Permasalahan angka kematian ibu melahirkan bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek ketersediaan:
  - jumlah sumber daya manusia pada Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 42,12 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 19,39 per 100.000 penduduk).

- belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONED (Pelayanan *Obstetric Neonatal Emergensi* Dasar).
- distribusi bidan desa.
- belum optimalnya penanganan komplikasi kebidanan.
- tingginya beban kerja tenaga medis puskesmas di luar pelayanan kesehatan.
- b. Aspek pemanfaatan:
  - kondisi ekonomi keluarga dan diperparah dengan rendahnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan (cakupan K4).
  - berbagai hambatan menyebabkan perempuan miskin tidak sepenuhnya memahami manfaat Jampersal, program asuransi Penderita untuk ibu hamil dan melahirkan.
  - kasus-kasus pernikahan dini yang diikuti kehamilan usia dini.
  - kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, terutama di pedesaan dan desa-desa terpencil.
  - adanya budaya masyarakat terutama di desa-desa terpencil yang tidak mendukung kesehatan ibu hamil.
  - rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit penyerta kehamilan seperti eklamsia, pre-eklamsia, hipertensi dan jantung.
  - masih adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
  - adanya migrasi ibu hamil menyebabkan tidak terkontrolnya riwayat pemeriksaan kehamilan.

#### **Prevalensi Balita Kekurangan Gizi:**

Permasalahan prevalensi balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah:

- a. Aspek ketersediaan:
  - belum meratanya upaya kesehatan masyarakat.
  - Belum meratanya upaya kesehatan perorangan.
- b. Aspek pemanfaatan:
  - kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penentu asupan gizi dan pola makan balita.
  - masih adanya budaya mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga dengan dalih sebagai tulang punggung kelangsungan ekonomi keluarga.
  - masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk pola makan, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.

#### **Bidang Ketenagakerjaan:**

##### **Tingkat Pengangguran Terbuka:**

Permasalahan tingkat pengangguran terbuka bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek ketersediaan:
  - kebijakan pemerintah dan swasta belum sepenuhnya pro tenaga kerja, terlihat dari belum maksimalnya fasilitasi akses permodalan/ kredit, investasi, perijinan dan perlindungan tenaga kerja.
  - belum kondusifnya situasi ekonomi dan politik dalam mendukung iklim investasi.
  - masih terbatasnya ketersediaan investasi yang bersifat padat karya.
  - belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah dan SDA.

- sarana prasarana dan SDM termasuk instruktur pada Balai Latihan Kerja (BLK) belum memadai.
  - penyediaan dan pembinaan pelatihan/kompetensi tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
  - keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja.
  - perubahan lahan pertanian menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian.
- b. Aspek pemanfaatan:
- kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja.
  - rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi kesempatan kerja.
  - rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan pencari kerja ber-basis kompetensi.
  - rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi.

#### **Bidang Sarana Prasarana / Infrastruktur Dasar:**

##### **Akses Berkelanjutan Rumah Tangga Miskin Terhadap Air Minum Layak:**

Permasalahan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Aspek ketersediaan:
- belum optimalnya penyediaan jaringan air (disebabkan antara lain oleh pembiayaan pemasangan jaringan masih mahal).
  - belum optimalnya tata kelola penyaluran air.
  - belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam penyediaan air yang berpihak pada masyarakat miskin.
  - lemahnya pengawasan penggunaan air non rumah tangga.
- b. Aspek pemanfaatan:
- rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air.
  - meningkatnya kebutuhan air akibat bertambahnya jumlah penduduk (baik dari fertilitas maupun urbanisasi).
  - masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketentuan teknis pengelolaan air limbah (*grey and yellow water*) terutama jarak resapan air pembuangan (*grey watter*) dengan sumber air bersih.

##### **Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Sanitasi Layak:**

Permasalahan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Aspek ketersediaan:
- lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan.
  - belum tersedia data dasar sebagai penentu zona sanitasi prioritas berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi.
  - belum berdayanya lembaga pengelola sanitasi.
- b. Aspek pemanfaatan:
- rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pola hidup bersih dan sehat khususnya tidak BAB di sembarang tempat dan tidak mem-buang limbah ke badan air.

- kondisi ekonomi keluarga terutama yang tinggal di daerah kumuh menjadi salah satu kendala dalam penyediaan sanitasi yang layak.

### **Bidang Ketahanan Pangan:**

#### **Produksi / Ketersediaan Bahan Pangan:**

Permasalahan produksi/ketersediaan bahan pangan pada bidang ketahanan pangan bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

##### a. Aspek ketersediaan:

- Database petani dan produksi pertanian (bahan pangan).
- Belum optimalnya implementasi UU nomor 19 tahun 2013.
- Permasalahan aturan tata niaga pertanian.
- Belum optimalnya aksesibilitas (jalan, irigasi, energi, air, transportasi, pasar).
- Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pertanian modern spesifik lokasi oleh pemerintah dari sumber-sumber teknologi.
- Belum adanya kebijakan untuk menyediakan penelitian dan pengembangan pertanian.
- Peran pemerintah belum maksimal dalam pemanfaatan tenaga ahli pertanian terutama dari lembaga riset dan teknologi.

##### b. Aspek pemanfaatan:

- Kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pertanian masih rendah.
- Usaha pertanian masih kecil sekali dan terpencar-pencar, petani masih sulit bersatu.
- Kebutuhan ekonomi yang mendesak dalam jumlah besar, mendorong petani dengan mudah melepas aset lahan pertanian.
- Semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian.
- Tawaran pekerjaan non-pertanian dengan penghasilan rutin mendorong alih profesi petani.

#### **Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Pangan:**

Permasalahan perkembangan harga kebutuhan pokok pangan bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:

##### a. Aspek ketersediaan:

- Belum adanya data yang pasti mengenai penduduk miskin.
- Belum ada kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada penduduk miskin tatkala harga pangan naik.
- Mekanisme pengendalian distribusi kebutuhan pokok pangan (terutama beras).
- Panjangnya rantai distribusi.
- Kerancuan data warga miskin.
- Belum memiliki program dan kebijakan yang melibatkan warga mampu dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi warga yang tidak mampu.
- Belum optimalnya aksesibilitas (jalan, transportasi, pasar).

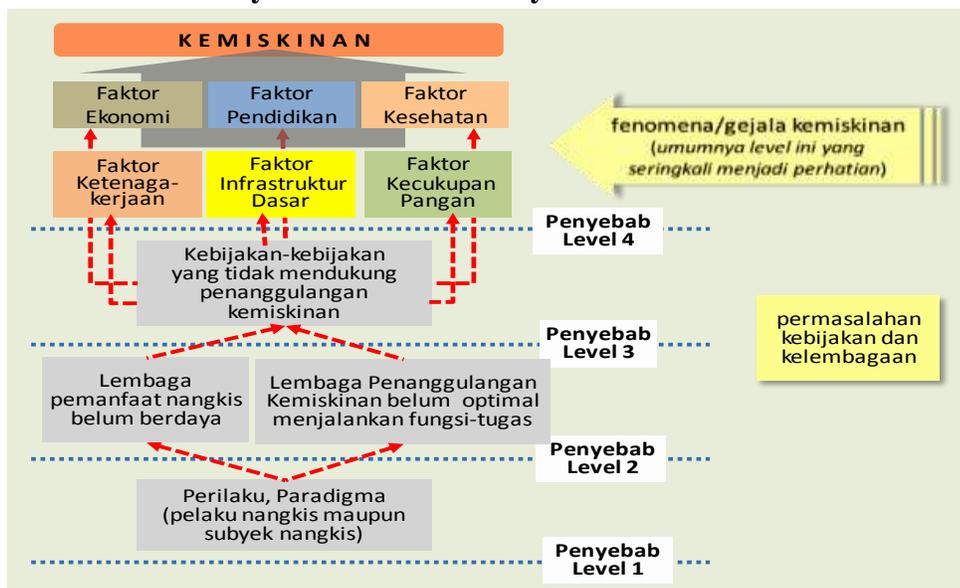
##### b. Aspek pemanfaatan:

- Beras masih menjadi bahan kebutuhan makanan pokok utama.
- Rendahnya diversifikasi pangan masyarakat.
- Rendahnya pendapatan penduduk miskin.
- Sikap mental (pada kelompok suku tertentu) yang merasa miskin dan harus mendapatkan bantuan semisal bantuan raskin.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015  
(Markus Patiung)

Berdasarkan uraian analisis akar masalah determinan kemiskinan (konsumsi dan non-konsumsi) di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari dimensi-dimensi kemiskinan, baik itu dimensi ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, maupun kecukupan pangan pada dasarnya adalah penyebab langsung dari kondisi kemiskinan seseorang atau seke-lompok orang. Ciri/kondisi yang menjadi penyebab kemiskinan ini merupakan akibat dari adanya keputusan, kebijakan atau tindakan yang cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. Keputusan, kebijakan maupun tindakan yang tidak adil dan cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan ini terjadi karena lembaga pengambil keputusan maupun kebijakan yang belum berdaya dikarenakan lembaga ini berisi orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskan nya. Di sisi lain ketidakberdayaan lembaga pengambil keputusan/kebijakan akan semakin tumbuh subur dalam situasi di mana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidak-berdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk men-gatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Gambar bagan berikut untuk lebih memahami penyebab dan akar penyebab kemiskinan.

**Gambar 9,**  
**Penyebab dan Akar Penyebab Kemiskinan**



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2011, Definisi Operasional Indikator MDG's, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2016, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia 2011-2015, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2015, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2015, Bangkalan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2016, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2016, Bangkalan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Bangkalan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2011, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2012, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2011-2012, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2013, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.

*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015*  
(Markus Patiung)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2014, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2015, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2015, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2015, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Surabaya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, 2014, Profil Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2014, Bangkalan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, 2015, Profil Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, Bangkalan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2012, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Surabaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2013, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, Surabaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2014, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Surabaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2015, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Surabaya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku II Agenda Pembangunan Bidang. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.

Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, 2011, Pedoman Penyusunan SPKD, Jakarta.

\_\_\_\_\_, <http://bps.go.id>

\_\_\_\_\_, <http://info-anggaran.com>

\_\_\_\_\_, <http://jatim.bps.go.id>

\_\_\_\_\_, <http://siskaperbapo.com>

\_\_\_\_\_, <http://www.tnp2k.go.id>